

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS

Dian Trisna Zai¹, Suhaji²

¹²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas AKI Semarang
trismadianzai@gmail.com¹, suhaji@unaki.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias periode 2014–2023. Kinerja keuangan diukur menggunakan Rasio Kemandirian Fiskal, yaitu perbandingan antara realisasi PAD dengan total pendapatan daerah. Kabupaten Nias dipilih karena memiliki karakteristik fiskal yang khas, yakni kontribusi PAD yang masih berada di bawah 15% dari total pendapatan daerah sehingga tergolong daerah dengan kemandirian fiskal rendah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research*. Data sekunder bersumber dari Laporan Realisasi APBD yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias; teknik *purposive sampling* menghasilkan 10 observasi tahunan. Data dianalisis dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ($t = 4,973$; $\text{sig.} = 0,003$), Dana Perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan ($t = -0,205$; $\text{sig.} = 0,844$), sedangkan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan ($t = -3,539$; $\text{sig.} = 0,012$). Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ($F = 10,305$; $\text{sig.} = 0,009$) dengan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,769. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa optimalisasi PAD menjadi kunci utama peningkatan kinerja keuangan daerah, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; belanja daerah; kinerja keuangan; rasio kemandirian fiskal

ABSTRACT

This study analyzes the effects of local own-source revenue (PAD), intergovernmental transfers, and regional expenditure on the financial performance of the Nias Regency Government over the 2014–2023 period. Financial performance is measured by the fiscal independence ratio, that is, the proportion of realized own-source revenue to total regional revenue. Nias Regency was selected because of its distinctive fiscal profile: own-source revenue contributes less than 15% of total regional revenue, placing it in the low fiscal-independence category. A quantitative approach with an explanatory research design was applied. Secondary data were obtained from the regional budget realization reports published by the Directorate General of Fiscal Balance and Statistics Indonesia of Nias Regency; purposive sampling yielded ten annual observations. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 25. The results show that, partially, own-source revenue has a positive and significant effect on financial performance ($t = 4.973$; $\text{sig.} = 0.003$), intergovernmental transfers have a negative but non-significant effect ($t = -0.205$; $\text{sig.} = 0.844$), whereas regional expenditure has a negative and significant effect ($t = -3.539$; $\text{sig.} = 0.012$). Simultaneously, the three variables significantly affect financial performance ($F = 10.305$; $\text{sig.} = 0.009$) with an R^2 of 0.769. This study provides empirical evidence that optimizing own-source revenue is the primary key to improving regional financial performance, particularly in regions with limited fiscal capacity.

Keywords: local own-source revenue; intergovernmental transfers; regional expenditure; financial performance; fiscal independence ratio

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Kinerja keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan tersebut. Namun, tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih relatif rendah. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024) menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2023 hanya mencapai 24,8%, sedangkan Dana Perimbangan masih mendominasi sebesar 61,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Selain aspek pendapatan, pengelolaan belanja daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Belanja daerah seharusnya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, namun

dalam praktiknya masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal (BPK, 2023). Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Nias yang memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif rendah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nias (2024), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada di bawah 15%, sehingga ketergantungan terhadap Dana Perimbangan masih sangat tinggi. Selain itu, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional yang menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Putri dan Siregar (2021) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Sari dan Rahayu (2022) menunjukkan hasil

yang tidak signifikan. Dana Perimbangan di satu sisi mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal (Wahyuni, 2020). Sementara itu, belanja daerah dinilai mampu meningkatkan efisiensi kinerja keuangan apabila dialokasikan secara efektif (Halim & Kusufi, 2019). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya *research gap*, terutama pada daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah seperti Kabupaten Nias.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂: Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₄: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research*, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengujian hipotesis dan pengukuran variabel secara numerik. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik, yang bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang tersedia secara publik, khususnya data tahunan yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias yang dapat diakses melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Teknik ini dipilih karena

penelitian memerlukan data yang memenuhi standar kelengkapan dan konsistensi agar hasil analisis dapat diandalkan.

Kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan adalah: (1) data laporan realisasi APBD Kabupaten Nias tersedia lengkap selama periode 2014 hingga 2023; (2) data dipublikasikan secara resmi oleh DJPK dan BPS; (3) data tidak mengandung nilai yang hilang (*missing value*) atau dilaporkan secara tidak lengkap; dan (4) data bukan merupakan *outlier* ekstrem yang dapat mendistorsi hasil analisis. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan adalah data tahunan selama 10 tahun, yaitu 2014 sampai dengan 2023.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah	Kumulatif
1	Laporan Realisasi APBD Kabupaten Nias tersedia lengkap periode 2014–2023	10	10
2	Data dipublikasikan secara resmi oleh DJPK dan BPS	0	10
3	Data mengandung <i>missing value</i> atau dilaporkan parsial (dikeluarkan)	0	10
4	Data <i>outlier</i> yang dikeluarkan dari analisis	0	10
	Total sampel yang digunakan	10	10

Sumber: Data sekunder DJPK dan BPS Kabupaten Nias, diolah (2026)

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Halim, 2007). Kinerja keuangan diukur menggunakan Rasio Kemandirian Fiskal yang mencerminkan besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = (\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Variabel independen penelitian terdiri atas tiga variabel. *Pertama*, Pendapatan Asli Daerah (X₁), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri; data diambil dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Nias dan diukur dalam satuan rupiah per tahun anggaran. *Kedua*, Dana Perimbangan (X₂), yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH); variabel ini diukur berdasarkan total realisasi Dana Perimbangan per tahun dalam satuan rupiah. *Ketiga*, Belanja Daerah (X₃), yaitu seluruh realisasi pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang diukur dalam satuan rupiah; menurut Halim dan Kusufi (2019), belanja daerah yang diarahkan secara proporsional pada sektor produktif akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan telah dipublikasikan, sehingga validitas serta reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan (Sekaran & Bougie, 2016). Data berupa data runtut waktu (*time series*) selama periode 2014–2023 yang berfokus pada Kabupaten Nias. Sumber data meliputi Laporan Realisasi APBD Kabupaten Nias dari DJPK, data statistik daerah yang dipublikasikan BPS Kabupaten Nias, serta laporan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan transfer ke daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Data diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Nias periode 2014–2023 yang diakses melalui DJPK, serta data pendukung dari BPS dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, data yang telah terkumpul ditabulasi dan diverifikasi untuk memastikan kelengkapan serta konsistensinya sebelum dianalisis.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen, seluruhnya pada taraf signifikansi 5%. Model regresi yang diuji dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y adalah Rasio Kemandirian Fiskal, X_1 adalah Pendapatan Asli Daerah, X_2 adalah Dana Perimbangan, X_3 adalah Belanja Daerah, a adalah konstanta, b_1 – b_3 adalah koefisien regresi, dan e adalah *error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Rasio Kemandirian Fiskal sebagai proksi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias periode 2014–2023, dengan jumlah observasi sebanyak 10 data tahunan.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Rasio Kemandirian Fiskal, sedangkan uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Dengan $n = 10$ dan $k = 3$, derajat kebebasan uji t adalah $df = n - k - 1 = 6$, sehingga diperoleh t tabel sebesar 2,447 pada taraf signifikansi 0,05.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	11,741	0,961	—	12,217	0,000
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	8,502E-11	0,000	1,421	4,973	0,003
Dana Perimbangan (X_2)	-5,002E-13	0,000	-0,071	-0,205	0,844
Belanja Daerah (X_3)	-9,903E-12	0,000	-1,501	-3,539	0,012

Variabel dependen: Rasio Kemandirian Fiskal (Y). B dan Std. Error = unstandardized coefficients; Beta = standardized coefficient. Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25 (2026)

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,741 + 8,502E-11 X_1 - 5,002E-13 X_2 - 9,903E-12 X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 11,741 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah bernilai nol, Rasio Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Nias diperkirakan sebesar 11,741 persen. Nilai tersebut menggambarkan tingkat dasar kemandirian fiskal daerah sebelum dipengaruhi variabel independen dalam model.

Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,502E-11 menunjukkan arah hubungan positif; setiap peningkatan PAD akan meningkatkan Rasio Kemandirian Fiskal dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar -5,002E-13 menunjukkan arah hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Perimbangan cenderung menurunkan rasio kemandirian fiskal. Sementara itu, koefisien regresi Belanja Daerah sebesar -9,903E-12 juga menunjukkan arah negatif, yang dapat terjadi apabila peningkatan belanja daerah tidak diikuti peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Nilai koefisien yang sangat kecil disebabkan oleh perbedaan skala pengukuran, yakni variabel independen dinyatakan dalam satuan rupiah sedangkan variabel dependen dalam satuan persen.

Hasil uji t pada Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung 4,973 > t tabel 2,447 dengan signifikansi 0,003 < 0,05, sehingga PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal dan H_1 diterima. *Kedua*, Dana Perimbangan memiliki t hitung -0,205 dengan signifikansi 0,844 > 0,05, sehingga Dana Perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan H_2 ditolak. *Ketiga*, Belanja Daerah memiliki t hitung -3,539 dengan nilai absolut lebih besar daripada t tabel 2,447 dan signifikansi 0,012 < 0,05, sehingga Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal dan H_3 diterima.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara simultan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal.

Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 0,05 dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 6$, sehingga F tabel sebesar 4,76.

Tabel 3. Hasil Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6,480	3	2,160	10,305	0,009
Residual	1,258	6	0,210	—	—
Total	7,737	9	—	—	—

Variabel dependen: Rasio Kemandirian Fiskal. Prediktor: (Constant), Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan. Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25 (2026)

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh F hitung sebesar $10,305 > F$ tabel 4,76 dengan signifikansi $0,009 < 0,05$. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Nias, sehingga H_4 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah secara bersama-sama menjadi faktor penting dalam menentukan kondisi keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin mendekati angka satu, semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square
1	0,877	0,769

Prediktor: (Constant), Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan. Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25 (2026)

Berdasarkan Tabel 4, nilai R sebesar 0,877 menunjukkan hubungan yang kuat antara ketiga variabel independen dan Rasio Kemandirian Fiskal. Nilai R Square sebesar 0,769 berarti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah mampu menjelaskan 76,9% variasi Rasio Kemandirian Fiskal, sedangkan sisanya sebesar 23,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dengan jumlah observasi sebanyak 10 dan tiga variabel independen, nilai R^2 yang disesuaikan (*adjusted* R^2) sebesar 0,654, sehingga kemampuan penjelasan model tetap tergolong kuat meskipun sedikit menurun setelah disesuaikan dengan jumlah parameter dan ukuran sampel.

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Nilai Uji	Sig.	Keputusan
H_1	PAD $\rightarrow$ Kinerja Keuangan	$t = 4,973$	0,003	Diterima
H_2	Dana Perimbangan $\rightarrow$ Kinerja Keuangan	$t = -0,205$	0,844	Ditolak
H_3	Belanja Daerah $\rightarrow$ Kinerja Keuangan	$t = -3,539$	0,012	Diterima
H_4	X_1, X_2, X_3 secara simultan $\rightarrow$ Kinerja Keuangan	$F = 10,305$	0,009	Diterima

Sumber: Diolah dari hasil SPSS versi 25 (2026)

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Nias ($t = 4,973$; sig. = 0,003). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskalnya. Hasil ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa peningkatan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, serta mendukung temuan Putri dan Siregar (2021). Sebaliknya, temuan ini berbeda dengan Sari dan Rahayu (2022) yang tidak menemukan pengaruh signifikan; perbedaan tersebut kemungkinan berkaitan dengan perbedaan karakteristik fiskal daerah yang diteliti. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber PAD menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Nias.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal ($t = -0,205$; sig. = 0,844), sehingga H_2 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya dana transfer dari pemerintah pusat belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Meskipun Dana Perimbangan berfungsi mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah, penggunaannya yang masih didominasi kebutuhan operasional menyebabkan kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi terbatas. Hasil ini konsisten dengan Wahyuni (2020) yang mengemukakan potensi ketergantungan fiskal akibat transfer pusat, sekaligus mengindikasikan bahwa efektivitas pemanfaatan dana transfer lebih penting dibandingkan besarnya dana yang diterima pemerintah daerah.

3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal ($t = -3,539$; sig. = 0,012), sehingga H_3 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah belum diikuti peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur belanja masih cenderung didominasi belanja operasional dibandingkan belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini melengkapi Halim dan Kusufi (2019) yang menekankan bahwa dampak belanja daerah terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada proporsi alokasinya pada sektor produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dengan mengarahkan alokasi anggaran pada sektor yang dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

4. Pengaruh Simultan Ketiga Variabel

Hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} 10,305 > F_{tabel} 4,76$ dengan signifikansi $0,009 < 0,05$, sehingga H_4 diterima. Nilai R^2 sebesar 0,769 menunjukkan bahwa 76,9% variasi Rasio Kemandirian Fiskal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan transfer pemerintah pusat dan belanja daerah. Sisa variasi sebesar 23,1% mengindikasikan adanya faktor lain di luar model, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, investasi, dan kualitas tata kelola anggaran.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, jumlah observasi hanya 10 data tahunan pada satu kabupaten, sehingga derajat kebebasan pengujian relatif kecil dan generalisasi temuan ke daerah lain perlu dilakukan secara hati-hati. *Kedua*, variabel independen diukur dalam nilai nominal rupiah tanpa penyesuaian inflasi maupun transformasi logaritma, sehingga koefisien regresi bernilai sangat kecil dan nilai *standardized coefficient* Pendapatan Asli Daerah melebihi satu, yang mengindikasikan adanya potensi multikolinearitas antarvariabel independen. *Ketiga*, kinerja keuangan hanya diproksikan dengan Rasio Kemandirian Fiskal, sedangkan rasio lain seperti efektivitas, efisiensi, dan derajat desentralisasi fiskal belum digunakan. *Keempat*, penelitian menguji hubungan langsung tanpa mempertimbangkan kemungkinan peran variabel mediasi atau moderasi, seperti pertumbuhan ekonomi dan kualitas belanja modal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias periode 2014–2023 menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ($\text{sig.} = 0,003$), sehingga peningkatan PAD mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan ($\text{sig.} = 0,844$), yang menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal secara optimal. Sementara itu, Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan ($\text{sig.} = 0,012$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja belum diimbangi peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri.

Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nias ($F = 10,305$; $\text{sig.} = 0,009$) dengan nilai R^2 sebesar 0,769 atau 76,9%. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan transfer pemerintah pusat dan belanja daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Nias perlu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
2. Pemanfaatan Dana Perimbangan dan pengelolaan Belanja Daerah perlu diarahkan pada program produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dengan memperbesar proporsi belanja modal dibandingkan belanja operasional.
3. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek dan periode penelitian, misalnya dengan menggunakan data panel lintas kabupaten/kota, serta menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi daerah, atau efektivitas pengelolaan anggaran agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias. (2024). *Kabupaten Nias dalam angka 2024*. Gunungsitoli: BPS Kabupaten Nias.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data APBD dan statistik keuangan daerah tahun 2021–2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, N., & Siregar, R. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 45–56.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, D., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 87–98.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach* (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedua). Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2020). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 101–112.